



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Ummum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Cilacap menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026
- KESATU : Lampiran Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP ,

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag. TPP dan Hukum

WEWENG MARETNO



Jari Sugiharto, S.H., M.H

1	Pengendalian Gratifikasi	b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - SK Unit Pengendalian Gratifikasi - Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor - Laporan Gratifikasi - Rapat Internalisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab. Cilacap 												
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Menyusun dokumen SPIP yang menguraikan unsur pengendalian.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SPIP KPU Cilacap melalui Rekap penyampaian Kartu kendali SPIP bulanan - Laporan SPIP SMT dan tahunan - BA Rapat Pleno - Dokumentasi Rapat Pleno - SK TIM SPIP 												
		b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun daftar resiko dan rencana tindak pengendalian untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan.	- Risk Register Risiko KPU Cilacap												
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	1. Menyusun daftar resiko dan rencana tindak pengendalian pada setiap program dan kegiatan, 2. Melakukan rapat pleno pengendalian internal secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Register Risiko - LKE/Penilaian mandiri maturitas - laporan kartu kendali SPIP bulanan 												
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	1. Melakukan sosialisasi pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan kepada seluruh jajaran KPU Kab. Cilacap, 2. Mensosialisasikan seluruh register resiko dan tindak pengendaliannya kepada seluruh jajaran KPU Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SPIP KPU Cilacap melalui Rekap penyampaian Kartu kendali SPIP bulanan - Laporan SPIP SMT dan tahunan - Scan BA Pleno - Dokumentasi Pleno/Sosialisasi - Bimtek SPIP oleh KPU Provinsi Jateng 												
		a. Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kab. Cilacap secara langsung ataupun online	<ul style="list-style-type: none"> - E-Banner, saluran pengaduan masyarakat melalui media sosial KPU Kab. Cilacap (E-mail, WhatsApp, Tlpn, Link Bitly di website - SOP Pengaduan Masyarakat 												

